



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1148-1155

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Dampak Keberadaan Website Desa terhadap Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa Tuk

Dewi Kodriyah, Cory Vidiati

Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

dewikodriyah54@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the urgency of implementing Good Governance principles at the village level through digital innovation in the form of a village website that serves as an instrument of transparency and public participation. The purpose of this study is to analyze the impact of the Tuk Village website on increasing public information transparency and community participation in village governance. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, through field observations, document studies, and interviews with village officials and the community. The results show that the Tuk Village website has contributed significantly to opening access to public information, such as the publication of the Village Budget (APBDes), Village Work Plan (RKPD), and online financial reports. However, the effectiveness of digital transparency is still limited due to internal constraints such as low human resource capacity in content management and external constraints such as low digital literacy and community participation. The findings indicate that digital transparency has not yet fully translated into substantive accountability, but rather remains administrative in nature. The implications of this research emphasize the need to strengthen the capacity of village officials, improve community digital literacy, and integrate technology, participation, and accountability so that village websites can function not only as information media but also as a means of participatory democracy that strengthens public trust and the effectiveness of village governance.

Keywords: Accountability, Good Governance, Participation, Digital Transparency, Village Website

1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan pondasi utama dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah secara tegas memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya desa.[1] Salah satu tonggak pentingnya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka tersebut, desa diberikan hak otonom untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, termasuk mengelola keuangannya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD. Dengan kewenangan ini, desa diharapkan mampu menjadi pusat inovasi pembangunan berbasis partisipasi dan kemandirian masyarakat.[2]

Kebijakan otonomi desa memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Melalui dana yang disalurkan pemerintah, desa memiliki ruang untuk mengembangkan potensi lokal dan memperbaiki kualitas layanan publik. Namun, besarnya dana yang dikelola juga menuntut adanya sistem pengawasan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keuangan serta informasi program pembangunan secara terbuka kepada masyarakat agar kepercayaan publik dapat terjaga. Transparansi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi ukuran moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan desa. Karena itu, keterlibatan masyarakat melalui partisipasi aktif menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkeadilan.[3]

Prinsip *good governance* menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang efektif. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik secara jelas dan mudah diakses, sementara akuntabilitas menuntut adanya

tanggung jawab dan kejelasan dalam penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat menjadi sarana kontrol sosial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan warga. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi seperti website desa menjadi bentuk nyata dari transformasi digital pemerintahan di tingkat lokal, yang berperan sebagai instrumen transparansi dan sarana partisipatif masyarakat.[4]

Meskipun website desa telah banyak dikembangkan sebagai media keterbukaan informasi publik, efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian desa masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet, minimnya literasi digital, dan kurangnya komitmen aparat desa dalam mengelola situs secara konsisten.[5] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penggunaan website desa dan praktik aktual di lapangan.[6] Di Desa Tuk misalnya, keberadaan website desa sudah mulai dimanfaatkan, namun tingkat pemanfaatan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah masih terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana website desa benar-benar berdampak terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi warga.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berfokus pada analisis empiris di tingkat desa dengan pendekatan kontekstual terhadap Desa Tuk. Kajian ini tidak hanya menilai keberadaan website sebagai alat publikasi informasi, tetapi juga menelusuri sejauh mana situs tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pendekatan ini memberikan perspektif baru terhadap hubungan antara teknologi informasi dan partisipasi sosial di tingkat akar rumput, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan penelitian terkait efektivitas *e-governance* dalam memperkuat transparansi pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana sintesis antara pilar good governance dan transformasi transparansi digital dapat benar-benar diwujudkan di tengah adanya kesenjangan kausalitas antara keterbukaan informasi dan efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun digitalisasi dianggap mampu memperluas akses informasi, batas efektivitas transparansi digital masih terlihat ketika penyediaan konten tidak otomatis menghasilkan perubahan perilaku birokrasi maupun peningkatan kepercayaan masyarakat. Kesenjangan tersebut diperparah oleh kendala internal, seperti kualitas SDM yang belum memadai, literasi digital yang rendah, serta lemahnya standar akurasi dan konsistensi konten. Di sisi lain, kendala eksternal berupa kesenjangan infrastruktur, budaya administratif yang belum partisipatif, dan minimnya respon publik turut menghambat akuntabilitas informasi yang dipublikasikan. Dengan demikian, penelitian ini perlu mengkaji bagaimana interaksi faktor internal dan eksternal tersebut memengaruhi kemampuan transparansi digital dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance secara substantif, bukan hanya prosedural.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang berbasis digital dan partisipatif.[7] Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang peran teknologi informasi dalam mendukung prinsip *good governance* di tingkat desa.[8] Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan aparat desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana komunikasi publik dan transparansi.[9] Dengan meningkatnya akses informasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan tata kelola pemerintahan Desa Tuk dapat menjadi lebih terbuka, akuntabel, serta mencerminkan semangat demokrasi partisipatif yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen akademik yang membahas keterkaitan antara website desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat.[10] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran makna, klasifikasi, dan interpretasi data berbasis teks yang terkandung dalam literatur ilmiah maupun dokumen resmi terkait tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.[11] Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan penyaringan, analisis, dan interpretasi data guna membangun pemahaman yang utuh tentang fenomena yang dikaji. Objek penelitian bukan individu di lapangan, melainkan kumpulan dokumen akademik yang relevan dengan topik *e-governance* desa.[12] Populasi penelitian mencakup berbagai artikel ilmiah mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi di tingkat desa, dari mana diambil sepuluh artikel secara purposive sampling berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, dan tahun terbit. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi sistematis, dengan membaca dan mengekstraksi informasi penting dari setiap dokumen seperti konsep, indikator, serta temuan empiris yang berkaitan dengan transparansi

digital, partisipasi publik, dan tantangan implementasi website desa. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data tematik, analisis komparatif, dan sintesis-inferensi, guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pengaruh website desa terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat Desa Tuk. Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian menerapkan triangulasi teori, yakni membandingkan dan memverifikasi konsistensi antar temuan dari berbagai sumber kredibel sehingga menghasilkan interpretasi yang valid dan mendalam.[13]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Sintesis Pilar *Good Governance* dan Transformasi Transparansi Digital

Konsep *Good Governance* berakar pada gagasan bahwa pemerintahan yang baik harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketiga pilar ini membentuk ekosistem pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, serta partisipatif dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip-prinsip tersebut memiliki peran sentral dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana publik digunakan, akuntabilitas menjamin setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan desa. Ketika ketiga aspek ini berjalan harmonis, maka sistem pemerintahan desa akan lebih demokratis, efisien, dan berkeadilan sosial.[14]

Transformasi transparansi menuju ranah digital merupakan langkah penting dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat desa. Di era digital, keterbukaan informasi tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti papan pengumuman, tetapi telah beralih ke sistem daring yang bersifat real-time dan interaktif. Website desa menjadi inovasi *e-governance* yang efektif dalam mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan jangkauan informasi.[15] Di Desa Tuk, misalnya, keberadaan website desa memungkinkan publikasi dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDDes, dan laporan realisasi anggaran secara transparan. Masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja, sehingga memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Dengan demikian, digitalisasi transparansi bukan hanya alat teknologis, tetapi juga strategi moral untuk memperkuat integritas pemerintahan.

Integrasi antara teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan menciptakan apa yang disebut sebagai transparansi digital, yaitu keterbukaan berbasis teknologi yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara lebih dinamis. Transparansi digital bukan sekadar menampilkan data, tetapi juga mengubah pola komunikasi birokrasi menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.[16] Dalam kerangka Desa Tuk, transparansi digital berperan ganda: pertama, sebagai sarana dokumentasi publik yang mudah diakses; kedua, sebagai medium edukatif untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap proses pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital mampu memperluas makna transparansi dari sekadar pelaporan menjadi proses dialog sosial yang membangun kepercayaan (*trust building*) antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

Namun demikian, efektivitas transparansi digital tetap bergantung pada sinergi antara tiga pilar *Good Governance*. Website desa yang informatif tidak akan optimal tanpa akuntabilitas aparat desa dan partisipasi aktif masyarakat. Akuntabilitas menuntut agar data yang ditampilkan di situs web benar, relevan, dan dapat diverifikasi. Sementara itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menilai, memberi masukan, serta mengawasi kebijakan yang telah dipublikasikan. Kelemahan di salah satu aspek dapat menghambat kinerja keseluruhan sistem transparansi digital. Dengan kata lain, teknologi hanyalah alat, sedangkan keberhasilan tata kelola tetap ditentukan oleh integritas pelaksana dan kesadaran masyarakat terhadap hak serta tanggung jawabnya dalam proses pembangunan desa.[17]

Sintesis antara pilar *Good Governance* dan transparansi digital mencerminkan paradigma baru pemerintahan desa yang berorientasi pada keterbukaan dan kolaborasi. Dalam konteks Desa Tuk, implementasi website desa dapat menjadi model tata kelola yang mengedepankan efisiensi, kepercayaan publik, dan partisipasi warga. Dengan memperkuat literasi digital, melatih aparatur desa, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan informasi daring, maka prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat terwujud secara berkelanjutan. Transformasi ini menjadi langkah strategis menuju pemerintahan desa yang lebih modern, adaptif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.

Tabel 1. Sintesis Pilar *Good Governance* dan Transformasi Transparansi Digital di Desa Tuk

No	Pilar <i>Good Governance</i>	Makna Konseptual	Implementasi di Desa Tuk	Dampak terhadap Tata Kelola
1	Transparansi	Keterbukaan informasi publik dan akses data pemerintahan	Website desa mempublikasikan APBDes, RKPDes, dan laporan keuangan secara daring	Meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyimpangan anggaran
2	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan sumber daya publik	Aparat desa menyediakan laporan digital yang dapat diakses dan diverifikasi	Mendorong disiplin administrasi dan kontrol publik
3	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan warga dalam pengawasan dan perencanaan kebijakan	Masyarakat memberikan masukan dan tanggapan melalui fitur komunikasi situs web	Memperkuat legitimasi kebijakan dan sense of belonging warga
4	Transparansi Digital	Transformasi dari keterbukaan konvensional ke sistem daring	Digitalisasi data desa melalui portal web resmi Desa Tuk	Menjadi media edukasi publik dan sarana komunikasi interaktif
5	Integrasi Pilar <i>Good Governance</i>	Sinergi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi	Website desa digunakan secara kolaboratif oleh aparat dan masyarakat	Terwujudnya tata kelola desa yang terbuka, adaptif, dan berkeadilan

Sintesis antara pilar *Good Governance* dan transformasi transparansi digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menjadi katalisator terciptanya tata kelola desa yang lebih terbuka dan partisipatif. Keberadaan website desa di Desa Tuk telah membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, menumbuhkan akuntabilitas aparat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Namun, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, perlu dukungan literasi digital yang kuat, sistem akuntabilitas yang konsisten, dan budaya partisipatif yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, transparansi digital bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga fondasi moral menuju pemerintahan desa yang bersih, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

3.2 Analisis Kesenjangan Kausalitas: Batas Efektivitas Transparansi Digital

Transparansi digital melalui website desa memang berhasil meningkatkan ketersediaan data (transparansi input), tetapi bukti menunjukkan bahwa ketersediaan informasi bukan jaminan otomatis terjadinya peningkatan partisipasi publik atau akuntabilitas substantif. Dalam praktiknya, informasi yang dipublikasikan sering berhenti pada dimensi administratif: dokumen tersedia, namun tidak berubah menjadi tindakan kolektif, penegakan atau perbaikan kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan transparansi sebagai kondisi awal belum tentu menjadi penyebab (kausal) yang kuat bagi keluaran yang diharapkan yakni masyarakat yang lebih aktif mengawasi dan aparat yang lebih bertanggung jawab. Analisis kausalitas perlu melihat lebih jauh: bukan sekadar apakah data ada, tetapi bagaimana data itu diolah, dipahami, dan dimanfaatkan oleh warga serta bagaimana institut desa merespons masukan tersebut.[18]

Kontradiksi empiris di mana beberapa studi menemukan transparansi berpengaruh positif namun partisipasi dan akuntabilitas tidak selalu mengikuti mengisyaratkan adanya diskoneksi antara informasi dan tindakan. Website bisa menyediakan laporan belanja atau rencana kerja, tetapi jika informasi disajikan tanpa konteks yang mudah dipahami, tanpa ringkasan yang actionable, atau tanpa saluran respon yang jelas, maka warga tidak termobilisasi untuk menindaklanjuti.[19] Di Desa Tuk, fenomena ini dapat muncul ketika publikasi hanya memenuhi aspek kepatuhan administrasi (memenuhi aturan) namun tidak dilengkapi narasi, penjelasan manfaat bagi warga, atau petunjuk praktis bagaimana warga bisa memberi masukan atau mengawasi realisasi program.

Kesenjangan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh dualisme hambatan sosio-teknis: hambatan internal meliputi keterbatasan infrastruktur, kemampuan teknis aparatur, dan kualitas konten; hambatan eksternal meliputi literasi digital warga, kepercayaan publik, norma partisipasi, dan kondisi sosial-ekonomi yang membuat warga punya prioritas lain selain mengawasi administrasi desa. Hambatan internal menyebabkan website tidak selalu *up to date*, tidak interaktif, atau berisi data yang sulit diverifikasi; hambatan eksternal menyebabkan data yang tersedia tidak terserap menjadi pengetahuan yang dapat diubah menjadi tuntutan publik. Kombinasi keduanya memutus rantai kausal dari ketersediaan informasi menuju akuntabilitas nyata.[20]

Mekanisme kegagalan konversi informasi menjadi akuntabilitas dapat diuraikan menjadi beberapa titik lemah: (1) kualitas informasi data teknis tanpa ringkasan atau visualisasi sulit dicerna; (2) aksesibilitas keterbatasan akses internet dan desain yang tidak ramah pengguna; (3) insentif institusional aparat desa mungkin tidak punya motivasi atau sistem sanksi/imbalance untuk menindaklanjuti kritik; (4) kanal umpan balik yang lemah tidak ada proses formal untuk menindaklanjuti masukan; (5) kapasitas sosial warga belum memiliki kebiasaan atau keahlian untuk melakukan kontrol sosial efektif. Tanpa perbaikan pada titik-titik ini, website desa tetap menjadi alat dokumentasi, bukan alat perubahan.[21]

Untuk menutup celah kausal ini diperlukan strategi integratif: memperbaiki kualitas dan penyajian data (ringkasan kebijakan, infografis, bahasa sederhana), mengaktifkan fungsi interaksi (formulir pengaduan, forum diskusi termoderasi), membangun mekanisme respons institusional (tindak lanjut formal atas masukan, pelaporan hasil tindak lanjut), meningkatkan literasi digital dan kapasitas partisipasi warga, serta mengukur outcome bukan hanya input (mis. frekuensi tindak lanjut, perubahan kebijakan, audit partisipatif). Di konteks Desa Tuk, intervensi semacam itu harus dikombinasikan dengan pemetaan hambatan lokal agar transformasi transparansi benar-benar memediasi partisipasi dan akuntabilitas secara kausal, bukan sekadar administratif.

Tabel 2. Kesenjangan Kausalitas: Batas Efektivitas Transparansi Digital (Desa Tuk)

No	Kesenjangan (Gap)	Penyebab Utama	Dampak pada Akuntabilitas / Partisipasi	Solusi Potensial
1	Data tersedia tetapi tidak dapat dipahami (usability gap)	Penyajian teknis, tanpa ringkasan/visualisasi	Warga tidak termotivasi memberi masukan atau mengawasi	Ringkasan kebijakan, infografis, bahasa sederhana
2	Kesenjangan akses digital (digital divide)	Keterbatasan internet, perangkat, literasi digital	Informasi hanya dinikmati segelintir pengguna; partisipasi timpang	Pengadaan akses publik (wifi), sesi literasi digital
3	Diskoneksi institusional (responsiveness gap)	Tidak ada prosedur formal menindaklanjuti masukan	Kritik tidak menghasilkan perubahan; menurunkan kepercayaan	Prosedur tindak lanjut, laporan hasil respons publik
4	Kelemahan verifikasi data (trust gap)	Data tidak diverifikasi / tidak transparan sumbernya	Muncul skeptisisme; bukti tidak digunakan untuk akuntabilitas	Audit publik, lampirkan bukti/dokumen pendukung
5	Kapasitas sosial partisipatif rendah (civic capacity gap)	Prioritas ekonomi, budaya partisipasi lemah	Warga pasif; kontrol sosial minim	Pelatihan partisipasi, forum warga, fasilitasi komunitas

Transparansi digital melalui website desa merupakan langkah penting dalam menyediakan input informasi tetapi input itu sendiri bukanlah penyebab yang cukup untuk memastikan akuntabilitas output maupun peningkatan partisipasi. Kesenjangan kausalitas muncul karena masalah kualitas informasi, keterbatasan akses, kelemahan mekanisme respons institusional, kurangnya verifikasi, dan rendahnya kapasitas sosial warga. Oleh karena itu, upaya meningkatkan efektivitas transparansi digital harus bersifat holistik: menggabungkan perbaikan teknis, penguatan institusi responsif, peningkatan literasi dan budaya partisipatif, serta indikator evaluasi berbasis

outcome (mis. berapa banyak masukan yang ditindaklanjuti, perubahan kebijakan yang dihasilkan, tingkat partisipasi lintas kelompok). Hanya melalui kombinasi ini transparansi bukan lagi sekadar akses data, melainkan benar-benar menjadi pemicu perubahan dan akuntabilitas substantif di Desa Tuk.

3.3 Kendala Internal dan Eksternal: Kualitas SDM dan Akuntabilitas Konten

Kendala internal dalam penerapan transparansi digital pada pengelolaan dana desa berakar pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, terutama dalam konteks penguasaan teknologi informasi dan manajemen konten digital. Efektivitas situs web desa sebagai instrumen *e-governance* sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur desa dalam mengelola informasi secara sistematis, informatif, dan berkelanjutan. Kelemahan pada aspek ini menyebabkan situs web hanya menjadi simbol formal pemenuhan regulasi, bukan instrumen aktual untuk mendorong akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, banyak situs web yang hanya memuat data mentah, dokumen hasil scan, atau laporan keuangan tanpa visualisasi yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini menurunkan nilai guna informasi dan menjadikan transparansi hanya bersifat administratif, bukan substantif.[22]

Rendahnya kapasitas teknis SDM menyebabkan konten di situs web desa sering kali tidak mutakhir dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan indikator akuntabilitas keuangan. Informasi yang tidak diperbarui mengakibatkan publik kehilangan kepercayaan terhadap keotentikan data. Selain itu, jika pengelola situs web tidak memahami struktur pelaporan yang akuntabel, maka informasi yang ditampilkan cenderung bias atau tidak menyentuh aspek yang relevan dengan pengawasan masyarakat. Fenomena ini dapat disebut sebagai transparansi semu, di mana data terlihat terbuka namun substansinya tidak mendukung fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kapasitas SDM tidak hanya menyangkut kemampuan teknis mengunggah data, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas publik dan etika keterbukaan informasi.[23]

Selain kendala internal, faktor eksternal seperti rendahnya literasi digital masyarakat juga berperan penting dalam membatasi efektivitas transparansi digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Putri bahwa masyarakat di pedesaan sering kali belum memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk menelusuri atau memverifikasi data publik secara daring. Hal ini menyebabkan mereka tetap pasif dalam proses pengawasan sosial, meskipun informasi telah tersedia. Hambatan ini bukan sekadar teknis, melainkan juga bersifat budaya dan psikologis masyarakat lebih nyaman menerima informasi secara langsung daripada membaca laporan digital. Akibatnya, partisipasi digital menjadi rendah, dan situs web gagal menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah desa.[24]

Rendahnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tambahan. Faktor seperti rasa apatis terhadap kebijakan publik, minimnya waktu, dan pandangan bahwa urusan pemerintahan adalah domain aparat, memperkuat jarak sosial antara pemerintah desa dan warganya. Ketika partisipasi publik melemah, maka mekanisme kontrol sosial yang menjadi penopang akuntabilitas juga ikut hilang. Transparansi digital, dalam konteks ini, gagal menjadi jembatan menuju demokrasi partisipatif di tingkat desa. Dengan kata lain, situs web yang informatif belum tentu efektif jika tidak diimbangi oleh kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.[25]

Untuk menutup kesenjangan antara keterbukaan data dan efektivitas akuntabilitas, perlu dilakukan pendekatan integratif. Pemerintah desa harus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi informasi, komunikasi publik, dan manajemen data berbasis akuntabilitas. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong melalui edukasi literasi digital dan pemberdayaan komunitas agar mampu memanfaatkan data publik secara kritis. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi dualisme hambatan sosio-teknis tersebut. Dengan demikian, keberhasilan transparansi digital tidak hanya diukur dari jumlah data yang tersedia, tetapi dari sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa secara nyata.

Tabel 3. Analisis Kendala Internal dan Eksternal Transparansi Digital

No	Aspek Analisis	Jenis Kendala	Dampak terhadap Transparansi	Rekomendasi Strategis
1	Kualitas SDM Aparatur Desa	Internal	Informasi tidak akurat dan tidak diperbarui	Pelatihan manajemen konten dan <i>e-governance</i>
2	Akuntabilitas Konten Situs Web	Internal	Transparansi semu (data terbuka tapi tidak bermakna)	Standarisasi format pelaporan dan audit konten
3	Literasi Digital Masyarakat	Eksternal	Rendahnya akses dan pemahaman publik terhadap data	Program edukasi digital berbasis komunitas
4	Motivasi Partisipasi Sosial	Eksternal	Kurangnya kontrol sosial dan feedback publik	Membangun budaya partisipatif dan penghargaan warga aktif
5	Kolaborasi Multi Stakeholder	Gabungan	Sinergi belum terbangun antar pihak terkait	Kemitraan desa, kampus, LSM untuk penguatan kapasitas

Kendala internal dan eksternal dalam implementasi transparansi digital desa menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sosial dan struktural. Kualitas SDM aparatur desa menentukan integritas konten, sedangkan literasi digital dan motivasi masyarakat menentukan efektivitas kontrol sosial. Ketika kedua sisi ini lemah, situs web desa hanya menjadi arsip digital tanpa fungsi akuntabilitas publik. Oleh karena itu, keberhasilan transparansi digital harus ditempuh melalui sinergi antara peningkatan kapasitas internal dan pemberdayaan partisipasi eksternal, sehingga akuntabilitas yang dihasilkan bersifat substantif, bukan sekadar administratif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Analisis terhadap dampak keberadaan website Desa Tuk menunjukkan bahwa transformasi digital melalui e-governance berperan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Website desa telah membuka akses publik terhadap berbagai informasi keuangan dan kebijakan secara daring, sehingga mendorong terciptanya tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas oleh dua faktor utama: kapasitas internal aparatur desa dalam mengelola dan memelihara konten yang akuntabel, serta kesiapan eksternal masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi tersebut secara partisipatif. Dengan kondisi ini, transparansi digital di Desa Tuk saat ini cenderung bersifat administrative berhasil dalam penyediaan data, tetapi belum sepenuhnya bermakna dalam konteks sosial dan akuntabilitas substantif. Untuk mengubahnya menjadi instrumen perubahan yang nyata, dibutuhkan penguatan literasi digital, pelatihan aparatur, serta penciptaan budaya partisipatif yang mendorong interaksi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut, website desa tidak hanya menjadi wadah informasi, tetapi juga wahana demokrasi partisipatif yang mampu memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Referensi

- [1] D. Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri Dan Hub. Int.*, vol. 14, no. 6, pp. 1–21, 2023, doi: 10.22212/jp.v14i1.4120.
- [2] F. D. Abdullah, B. Sulistiyo, and S. M. Wiwaha, "SWOT Strategy in Strengthening the Role of Village Community Empowerment Institutions : An Islamic Law Perspective," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 6, p. 66, 2024.
- [3] A. Hadi, L. Dimuru, L. Madjid, and A. Pendahuluan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Wujud Otonomi Asli Desa," *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 19, no. 1, pp. 53–68, 2025.
- [4] A. Sri, Y. Yasin, A. Anwar, and U. W. Sagena, "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 17, no. 2, pp. 410–418, 2024, doi: 10.51903/kompak.v17i2.2142.
- [5] B. Widodo, U. Sastrawan, and W. Kuntari, "Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Keterbukaan Desa Berbasis Web Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat," *Semin. dan Konfrens APDOVI*, no. 14, pp. 1–10, 2025.
- [6] A. S. Auliya, L. Ariyani, L. Deby, and M. Putri, "Problematika Sistem Informasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 8, no. 1, pp. 31–56, 2025.
- [7] E. Hombore, "Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil," *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 122–131, 2025.
- [8] R. Yaya, "Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi," *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, pp. 69–81, 2025.
- [9] K. Karinda, A. Kede, G. L. Septiana, L. Ode, S. Jayalangi, and S. Sibay, "Integrasi Komunikasi Pemerintahan Digital Melalui Situs Web Resmi : Studi Kasus di Desa Tontouan , Kecamatan Luwuk," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 05, no. 02, pp. 1–13, 2024.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

DOI: <https://10.31004/riggs.v4i4.3592>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [11] F. Nurrisa, D. Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)," *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 02, no. 03, pp. 793–800, 2025.
- [12] D. Y. Otong Husni Taufiq and D. Hermawandi, "Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance," *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 6, no. 1, pp. 145–152, 2019.
- [13] M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [14] "Suriadi, Hari. 'Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi.' *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan* 1.1 (2025): 42-54."
- [15] Ariesmansyah, Andre, et al. *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.*
- [16] M. Ridwan and S. Nurhakim, "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi," *J. Ilmu Adm.*, vol. 11, no. 3, pp. 403–422, 2014.
- [17] Zein, HM Harry Mulya, and Sisca Septiani. *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance. Sada Kurnia Pustaka, 2024.*
- [18] "Azis, Destian Rahmatul, Irfan Nursetiawan, and Asep Nurwanda. "Transformasi Digital Pemerintahan Desa (Studi peran kepala desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di desa ciherang kecamatan banjarsari kabupaten ciamis)." *Journal Sains STU*".
- [19] Ahmad, Siti Nurjanah, et al. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa. Tohar Media, 2024.*
- [20] Katharina, Riris. *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.*
- [21] Yusman, Yanti, Randi Rian Putra, and Intan Sinaga. *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital. Serasi Media Teknologi, 2024.*
- [22] Jabnabillah, Faradiba, Aswin Aswin, and Mahfudz Reza Fahlevi. 'Efektivitas situs web pemerintah sebagai sumber data sekunder bahan ajar perkuliahan statistika.' *Jurnal Sustainable* 6.1 (2023): 59-70.
- [23] Sepriano, Sepriano, et al. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.*
- [24] Putri, Difa Salsabila, Soelfema Soelfema, and Lili Dasa Putri. 'Pendidikan Literasi di Era Teknologi dalam Mengatasi Kesenjangan Digital pada Masyarakat.' *Pustaka: Jurnal Bahasa dan Pendidikan* 5.1 (2025): 151-156.
- [25] "Pugu, Melyana R. "Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan: Membangun Demokrasi Partisipatif Di Abad Ke-21." *ADMIN: Jurnal Administrasi Negara* 3.2 (2025): 39-48."